



RSUD. LABUANG BAJI
Provinsi Sulawesi Selatan

RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2021

Jalan Dr. Ratulangi No. 81 Makassar
Telp. (0411) 872120 –873482 Fax. (0411) 830454
E-mail : rsudlabuangbaji.sulsel@gmail.com

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daeerah.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	27
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	35
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	36
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	39
BAB V PENUTUP	45

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 dapat disusun tepat waktu.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan acuan perencanaan Organisasi Perangkat Daerah selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan RENJA-PD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan peraturan secara terperinci dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

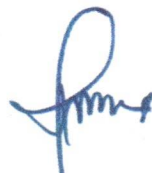
Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 ini merupakan kegiatan rutin tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Rencana Kerja Tahun 2021 yang telah disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 serta RENSTRA RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Rencana Kerja merupakan dasar perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, acuan operasional, alat pengendalian dan dasar akuntabilitas. Rencana Kerja berisi tentang Latar Belakang, Maksud, Tujuan, Landasan Hukum, hubungan Rencana Kerja dengan dokumen perencanaan lainnya, isu-isu strategis, dan kebijakan serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021 serta rencana pembiayaannya.

Kami berharap bahwa Rencana Kerja ini dapat mengantarkan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan memberikan pelayanan kesehatan pada tahun 2021 untuk mewujudkan tujuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah dan Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat/Pasien.

Makassar, April 2020

Direktur,



dr.H. ANDI MAPPATOBA, MBA, DTAS
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19670128199803.1.004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana jangka Panjang Nasional (RJPN) tahun 2005-2025.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata serta mengutamakan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut dan keluarga miskin dilain pihak.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melauai salah satu kebijakan dan agenda utama yang tetuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 yakni Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan keberadaan RSUD Labuang Baji Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk mewujudkan Visi yang tertuang dalam Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, yaitu "Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif,

Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”. Kelima pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 dimana terjemakan menjadi Provinsi Sulawesi Selatan yang “Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter”.

Untuk mendukung Visi Sulawesi Selatan tersebut, maka RSUD Labuang Baji mempunyai visi “Menjadi Rumah Sakit Unggulan Provinsi yang Inovatif dan Kompetitif Tahun 2023” yang diharapkan bersinergi dan mendukung pencapaian target serta tujuan pembangunan, khususnya pembangunan sektor kesehatan di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan.

Dalam penyusunannya rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rancangan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Tahun 2021 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2018-2023.

Rancangan Renja ini juga merupakan salah satu dokumen perencanaan yang merupakan acuan sekaligus hasil kesepakatan lanjutan bagi seluruh komponen RSUD Labuang Baji dalam menjalankan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021. Rancangan Renja ini juga mengacu pada Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 yang merupakan akumulasi dari seluruh Rancangan Renja OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan akan dipakai sebagai bahan Musyawarah Pembangunan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021. Atas dasar hal tersebut maka

penyusunan Rancangan Renja Tahun 2021, merupakan tahapan mekanisme perencanaan yang sangat penting untuk dilakukan.

RSUD Labuang Baji yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit pusat rujukan regional yang ada di Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Regionalisasi Sistem Rujukan Rumah Sakit di Sulawesi Selatan. Keberadaan sumber daya manusia yang terdiri dari Dokter Spesialis dan Subspesialisasi/Konsultan serta tenaga paramedis yang terlatih sesuai dengan kompetensinya diharapkan mampu menyanggah sebagai pusat rujukan tersebut.

Terkait dengan Rencana Kerja Tahun 2021, maka sasaran, arah kebijakan, dan tujuan yang ingin dicapai oleh RSUD Labuang Baji dalam rangka menghadapi dan menjawab isu strategis tersebut melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatannya selama satu tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 masing-masing sub kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja dan rencana tingkat capaian atau target sesuai dengan kebijakan yang ditempuh RSUD Labuang Baji dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
 - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1447);
- 16) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1164/MENKES/SK/X/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan perencanaan pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan;
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 - 2028;
- 19) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan : (7/2015, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
- 22) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan;
- 23) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 8);

- 24) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 tentang Penetapan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai SKPD untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dan sesuai dengan tujuan rencana strategis yaitu menjabarkan visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (RPJMD) Tahun 2018-2023), terutama yang terkait dengan peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan pelayanan kesehatan dalam menentukan strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

- a. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun Anggaran 2021;
- b. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan anggaran;
- c. Terwujudnya integritas, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- d. terciptanya pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- e. Memudahkan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berisi tentang Penyusunan Renja RSUD Labuang Baji Tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

Memuat dasar regulasi sebagai acuan kebijakan dalam perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berisi Evaluasi Rencana Strategis, Evaluasi Kinerja Renja Perangkat Daerah dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan tahun lalu.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Analisis tentang evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan sebelumnya diperlukan untuk mendapatkan informasi dan masukan tentang keberhasilan pelaksanaan pembangunan berikut faktor keberhasilan dan kendala yang dihadapi. Informasi ini sangat berguna dalam merumuskan kebijakan pembangunan berikut program dan kegiatan yang akan direncanakan untuk tahun berikutnya dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun berdasarkan laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Renstra RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 secara keseluruhan pelaksanaan Renja mencapai 100,00 %.

A. PENINGKATAN KINERJA DALAM RANGKA PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH.

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi RSUD Labuang Baji, maka dilaksanakan program peningkatan kinerja dalam rangka penguatan kelembagaan yang diselenggarakan melalui 2 program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.

Adapun Program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

Tabel 1.
Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tahun Anggaran 2019

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	(%)
I.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	291.700.000,00	290.969.775,00	730.225,00	99,75
1	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	291.700.000,00	290.969.775,00	730.225,00	99,75

Pada tabel 1 di atas menunjukkan bahwa Program ini dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 291.700.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 290.969.775,00 atau 99,75% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 730.225,00.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.

Tabel 2.
Realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tahun Anggaran 2019

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	(%)
II.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	350.600.000,00	347.214.720,00	3.385.280,00	99,03
1	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	350.600.000,00	347.214.720,00	3.385.280,00	99,03

Pada tabel 2 di atas menunjukkan bahwa Program ini dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 350.600.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 347.214.720,00 atau 99,03%.

B. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan RSUD Labuang Baji, maka dilaksanakan program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan melalui 6 program sebagai berikut :

1. Program Upaya Kesehatan Dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan (Prioritas);
2. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/UPTD Kesehatan;
3. Program Pengembangan Kapasitas Organisasi Dan Tata Laksana BLUD;
4. Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/UPTD Kesehatan;

5. Program Pengadaan Obat-Obatan, Makan Minum Dan Logistik Rumah Sakit/UPTD Kesehatan;
6. Program Pengembangan Spesialisasi Dan Kualitas Layanan Rumah Sakit (Prioritas)

Adapun Program dan kegiatan adalah sebagai berikut

1. Program Upaya Kesehatan Dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan (Prioritas)

Tabel 3.
Realisasi Upaya Kesehatan Dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan (Prioritas)
Tahun Anggaran 2019

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	(%)
I.	PROGRAM UPAYA KESEHATAN DAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN (PRIORITAS)	796.720.454,00	790.749.658,00	5.970.796,00	99,25
1	Peningkatan SDM Tenaga Keperawatan	271.720.454,00	271.510.000,00	210.454,00	99,92
2	Pembimbingan dan Survei Simulasi Akreditasi	375.000.000,00	374.747.318,00	252.682,00	99,93
3	Pelatihan Excellence Service	150.000.000,00	144.492.340,00	5.507.660,00	96,33

Pada tabel 3 di atas menunjukkan bahwa Program ini dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 796.720.454,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 790.749.658,00 atau 99,25% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 5.970.795,00.

2. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/UPTD Kesehatan.

Tabel 4.
Realisasi Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/UPTD Kesehatan
Tahun Anggaran 2019

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	(%)
I.	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN	44.152.232.311,00	44.148.106.225,00	4.126.086,00	99,99
1	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan	11.608.593.174,00	11.608.593.172,00	2,00	100,00
2	Pembangunan Tahap III Gedung A & B dan Gedung Perawatan Anak Rumah Sakit	29.205.165.137,00	29.202.779.053,00	2.386.084,00	99,99
3	Peningkatan Sarana AMDAL	300.000.000,00	298.760.000,00	1.240.000,00	99,59
4	Pengadaan Instalasi Listrik Dan Air	2.988.474.000,00	2.988.474.000,00	-	100,00
5	Pengadaan Media Promosi Kesehatan RS / CHT	50.000.000,00	49.500.000,00	500.000,00	99,00

Pada tabel 4 di atas menunjukkan bahwa Program ini dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 44.152.232.311,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 44.148.106.225,00 atau 99,99% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 4.126.086,00.

3. Program Pengembangan Kapasitas Organisasi dan Tata Laksana BLUD.

Tabel 5.
Realisasi Program Pengembangan Kapasitas Organisasi dan Tata Laksana BLUD
Tahun Anggaran 2019

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	(%)
III.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BLUD	46.389.000.000,00	34.728.884.213,00	11.660.115.787,00	74,86
1	Peningkatan Kinerja Pelayanan Kesehatan Masyarakat	46.389.000.000,00	34.728.884.213,00	11.660.115.787,00	74,86

Pada tabel 5 di atas menunjukkan bahwa Program ini dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 46.389.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.728.884.213,00 atau 74,86% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 11.660.115.787,00.

4. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/UPTD Kesehatan

Tabel 6.
Realisasi Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/UPTD
Kesehatan Tahun Anggaran 219

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	(%)
IV.	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN	577.206.240,00	577.170.000,00	36.240,00	99,99
1	Pengadaan / Pemeliharaan Instalasi Sarana Dan Prasarana RS	577.206.240,00	577.170.000,00	36.240,00	99,99

Pada tabel 6 di atas menunjukkan bahwa Program ini dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 1577.206.240,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 577.170.000,00 atau 99,09% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 36,240,00.

5. Program Pengadaan Obat-Obatan, Makan Minum Dan Logistik Rumah Sakit/UPTD Kesehatan.

Tabel 7.
Realisasi Program Pengadaan Obat-Obatan, Makan Minum dan Logistik Rumah Sakit/UPTD Kesehatan Tahun Anggaran 2019

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	(%)
V.	PROGRAM PENGADAAN OBAT-OBATAN, MAKAN MINUM DAN LOGISTIK RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN	1.850.000.000,00	1.849.601.393,00	398.607,00	99,98
1	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.850.000.000,00	1.849.601.393,00	398.607,00	99,98

Pada tabel 7 di atas menunjukkan bahwa Program ini dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 1.850.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.849.601.393,00 atau 99.98% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 398.607,00.

6. Program Pengembangan Spesialisasi Dan Kualitas Layanan Rumah Sakit (Prioritas)

Tabel 8.
Realisasi Program Pengembangan Spesialisasi dan Kualitas Layanan Rumah Sakit (Prioritas) Tahun Anggaran 2019

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	(%)
VI.	PROGRAM PENGEMBANGAN SPESIALISASI DAN KUALITAS LAYANAN RUMAH SAKIT (PRIORITAS)	200.000.000,00	199.528.564,00	471.436,00	99,76
1	Workshop Pembuatan Clinical Patway	200.000.000,00	199.528.564,00	471.436,00	99,76

Pada tabel 8 di atas menunjukkan bahwa Program ini dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 199.528.564,00 atau 99.76% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 471.436,00.

C. REALISASI ANGGARAN

Di dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi yang ada pada RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan tidak lepas dari adanya dukungan pembiayaan/penganggaran. Adapun sumber pembiayaan pada tahun 2019

yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. PENDAPATAN

Pada Tahun Anggaran 2019, Pendapatan Asli Daerah (PAD) RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan ditargetkan sebesar Rp. 46.429.500.000,00,00. dapat direalisasikan sebesar Rp 35.470.909.811,11,00 atau 76,40%. realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 9.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah RSUD Labuang Baji
Tahun Anggaran 2019

NO.	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	46.429.500.000,00	35.470.909.811,11	76,40
1	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	46.429.500.000,00	35.470.909.811,11	76,40

2. BELANJA

Untuk Tahun Anggaran 2019, Pagu Anggaran RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan melalui APBD Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak Rp. 163.897.045.942,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 152.171.811.485,00 atau 92,85%. yang terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

Total alokasi pagu anggaran untuk belanja tidak langsung pada RSUD Labuang Baji sebesar Rp. 69.289.586.937,00 dengan realisasi Rp. 69.239.586.937,00 atau 99,93%.

b. Belanja Langsung

Total alokasi pagu anggaran untuk belanja langsung pada RSUD Labuang Baji sebesar Rp. 94.607.459.005,00 dengan realisasi anggaran Rp. 82.932.224.548,00 atau 87,66% yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Belanja Barang dan Jasa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 48.154.626.694,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 36.491.362.203,00 atau 75,78%;
2. Belanja Modal dengan pagu anggaran sebesar Rp. 46.452.832.311,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 46.440.862.345,00 atau 99,97%.

Berdasarkan evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, maka realisasi program/kegiatan dapat dijelaskan antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan semua memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, sekalipun tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan namun 92,85% realisasi program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Implikasi terhadap target capaian program Renstra SKPD
 - a. Profesionalisme manajemen rumah sakit mengalami perkembangan melalui proses pendidikan dan pelatihan.
 - b. Organisasi rumah sakit dikembangkan menjadi *customer oriented organization* dengan peningkatan kualitas pelayanan medik dan non medik untuk memenuhi tuntutan dan kepuasan konsumen.
 - c. Kualitas pelayanan rumah telah terakreditasi versi SNARS.
 - d. Profesionalisme tenaga paramedis keperawatan dan non keperawatan dapat dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan profesi masing-masing.
3. Kebijakan perencanaan dan penganggaran melalui APBD dan BLUD, RSUD Labuang Baji senantiasa mengusulkan kegiatan melalui Dana Transfer dalam hal ini Dana Alokasi Khusus (DAK) dan DBH-CHT.

Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Tahun berjalan) dapat diuraikan pada Tabel TC. 29 sebagai berikut :

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Tahun berjalan)
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Perangkat Daerah : RSUD Labuang Baji														
Kode		Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
1		2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1.01	02	Ususan Wajib Pelayanan Dasar												
1.01	02	Kesehatan												
1.01	02	Rumah Sakit umum Labuang Baji												
0.00	00	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			% Pemenuhan administrasi perkantoran	90%	90%	90%	100,00%	85%	85%	94,44%	
0.00	00	50	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS			Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	190 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	190 Orang	190 Orang	100%	
0.00	00	50	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah ATK yang tersedia	2 Jenis ATK	12 Bulan	0 Jenis ATK	0 Jenis ATK	0%	2 Jenis ATK	100%	
0.00	00	50	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	1 Unit	1 Kegiatan	1 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0%	
0.00	00	50	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Jumlah perjalanan dinas	25 Kali	1 Kegiatan	20 Kali	20 Kali	100%	25 Kali	100%	

Kode		Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
0.00	00	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
0.00	00	51	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	60%	60%	60%	60%	60%	100,00%	70%	70%	116,67%
0.00	00	51	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	0 Unit	13 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0 Unit	0%
0.00	00	51	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	90 Unit	9 Kegiatan	90 Unit	90 Unit	100%	90 Unit	90 Unit	100%
0.00	00	51	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	1 Sistem Informasi/Aplikasi	1 Kegiatan	0 Sistem Informasi/Aplikasi	0 Sistem Informasi/Aplikasi	0%	1 Sistem Informasi/Aplikasi	0 Sistem Informasi/Aplikasi	0%
0.00	00	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Ketepatan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	90%	0%	0%	0%	0%	90%	90%	100%
0.00	00	52	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	1 Dokumen	0 Kegiatan	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
				Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	0 Kegiatan	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
				Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	1 Dokumen	0 Kegiatan	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
0.00	00	52	Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK	Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK	1 Usulan Kegiatan	0 Usulan Kegiatan	0 Usulan Kegiatan	0 Usulan Kegiatan	0%	1 Usulan Kegiatan	1 Usulan Kegiatan	100%
0.00	00	52	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	1 Laporan	0 Kegiatan	0 Laporan	0 Laporan	0%	1 Laporan	1 Laporan	100%
0.00	00	52	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	0 Kegiatan	0 Laporan	0 Laporan	0%	1 Laporan	0 Laporan	0%

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	0.00 00 53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
0.00 00 53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawalan	Jumlah laporan administrasi kepegawalan yang disusun	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	0 Laporan	0 Laporan	0%
0.00 00 53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	563 Pasang	0 Pasang	0 Pasang	0 Pasang	0%	0 Pasang	0 Pasang	0%
0.00 00 53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	0 Pasang	0 Pasang	0 Pasang	0 Pasang	0%	0 Pasang	0 Pasang	0%
0.00 00 53	008	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	557 Orang	0 Orang	0%
1.01 02 03		PROGRAM UPAYA KESEHATAN DAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN (Prioritas)	Cakupan pasien yang mendapatkan perawatan sesuai standar pelayanan	90%	80%	80%	80%	100%	85%	85%	94%
1.01 02 03	001	Peningkatan SDM Tenaga Keperawatan	Jumlah peserta pelatihan dan bimbingan	40 Orang	4 Kegiatan	40 Orang	40 Orang	100%	40 Orang	0 Orang	0%
1.01 02 03	002	Pembimbingan dan Survei Smulasi Akreditasi	Jumlah Dokumen Akreditasi Rumah Sakit	1 Dokumen	0 Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
1.01 02 03	003	Pelatihan Keperawatan Medical Bedah Perawatan Luka	Jumlah peserta pelatihan	0 Orang	3 Kegiatan	0 Orang	0 Orang	0%	30 Orang	0 Orang	0%
1.01 02 03	004	Pelatihan Manajemen Rawat Jalan	Jumlah peserta pelatihan	30 Orang	3 Kegiatan	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%
1.01 02 03	005	Bimtek / Kursus Pelatihan Asuhan Keperawatan Rawat Inap	Jumlah peserta pelatihan	0 Orang	0 Kegiatan	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%
1.01 02 03	007	Peningkatan Kapasitas Tenaga Medik di selap KSM	Jumlah peserta pelatihan dan sosialisasi	30 Orang	75 Kegiatan	0 Orang	0 Orang	0%	30 Orang	0 Orang	0%
1.01 02 03	008	Pelatihan Excellence Service	Jumlah peserta pelatihan	30 Orang	0 Kegiatan	30 Orang	30 Orang	100%	30 Orang	0 Orang	0%

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	02	05	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01	02	05	Jumlah RS Provinsi yang terdaftar kelembagaannya berdasarkan spesialisasi		1 RS	1 RS	1 RS	1 RS	1 RS	0 RS	0%
1.01	02	05	Jumlah peserta pelatihan tenaga ahli		0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%
1.01	02	05	Jumlah peserta pelatihan tenaga Rumah Sakit		30 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	30 Orang	0 Orang	0%
1.01	02	05	Jumlah peserta workshop		30 Orang	30 Orang	30 Orang	100%	0 Orang	0 Orang	0%
1.01	02	12	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Labuang Baji		80%	80%	80%	100%	85%	85%	106%
1.01	02	12	Jumlah Kebutuhan Peralatan Medis RS yang tersedia		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01	02	12	Jumlah Kebutuhan Rutin Peralatan Medis RS yang tersedia		12 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	0%	12 Bulan	0 Bulan	0%
1.01	02	12	Jumlah Sarana Lingkungan RS yang tersedia		1 Paket	0 Paket	0 Paket	0%	1 Paket	0 Paket	0%
1.01	02	12	Jumlah Sarana Dan Prasarana RS yang terbangun		1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	0%
1.01	02	12	Tersedianya Fasilitas Lingkungan Sehat		0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
1.01	02	12	Alat Sterilisasi pada Ruangan CCSD		1 Set	0 Set	0 Set	0%	1 Set	0 Set	0%
1.01	02	12	Jumlah IPAL yang tersedia		0 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	0 Unit	0 Unit	0%
1.01	02	12	Jumlah Genset yang tersedia		0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0 Unit	0%
1.01	02	12	Jumlah peralatan Laundry		1 Paket	0 Paket	0 Paket	0%	1 Paket	0 Paket	0%
1.01	02	12	Jumlah Media Promosi Tentang Bahaya Rokok di RS yang tersedia		1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%

Kode	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01	02	13	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN		80%						
1.01	02	13	Kalibrasi Alat Kesehatan RS		1 Paket	0 Paket	0 Paket	0%	1 Paket	0 Paket	0%
1.01	02	13	Pengadaan / Pemeliharaan Instalasi Sarana Dan Prasarana RS		1 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	1 Unit	1 Unit	100%
1.01	02	13	Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman dan Sarana Parkir RS		2 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	2 Unit	0 Unit	0%
1.01	02	13	Pemeliharaan Rutin Kebersihan Rumah Sakit		1 RS	1 RS	1 RS	100%	1 RS	0 RS	0%
1.01	02	13	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung RS		1 Tahun	0 Tahun	0 Tahun	0%	1 Tahun	0 Tahun	0%
1.01	02	15	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BLUD		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.01	02	15	Peningkatan Kinerja Pelayanan Kesehatan Masyarakat		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.01	02	16	PROGRAM PENGADAAN OBAT-OBATAN, MAKAN MINUM DAN LOGISTIK RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN		80%	80%	80%	100%	85%	85%	106%
1.01	02	16	Pengadaan Obat-Obatan		12 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	0%	12 Bulan	0 Bulan	0%
1.01	02	16	Pengadaan Bahan Habis Pakai		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan pelayanan rumah sakit memiliki indikator yang berbeda dengan OPD pada umumnya, karena disini menyangkut penguatan kelembagaan pemerintah. Indikator untuk kelembagaan pemerintah berupa indikator terdiri dari : **Nilai SAKIP RSUD Labuang Baji, % Rata-rata Capaian Kinerja Program RSUD Labuang Baji, % Temuan Material** dan pelayanan publik bidang kesehatan. Indikator untuk pelayanan medik rumah sakit berupa Indikator khusus terdiri dari : **BOR, AvLOS, TOI, BTO, GDR, NDR.**

Indikator Program, kegiatan dan sub kegiatan yang digunakan di RSUD Labuang Baji dari :

- Indikator input** : Berupa dana APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan Sumber Daya Manusia
- Indikator output** : Tingkat pencapaian pelayanan sesuai rencana, sehingga terjadi peningkatan kualitas pelayanan.
- Indikator benefit/infact** : Indikator yang berpengaruh pada jangka panjang yang menghasilkan keuntungan, dan belum bisa dimonitor pada jangka pendek.

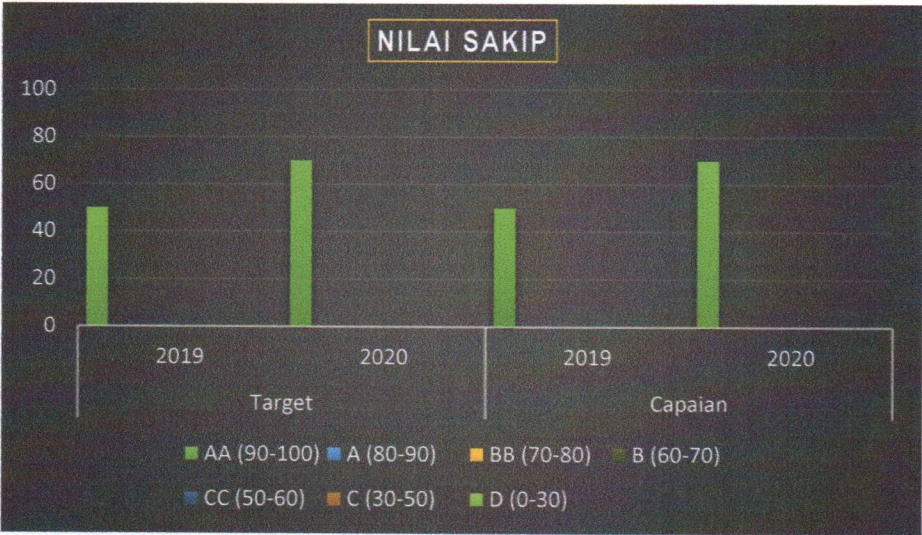
Kegiatan pelayanan kesehatan khususnya RSUD Labuang Baji memiliki kinerja bidang pelayanan. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh RSUD Labuang Baji dapat dijelaskan dalam pencapaian sasaran sebagai berikut:

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah RSUD Labuang Baji
Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai SAKIP RSUD Labuang Baji	-	-	CC (50-60)	B (60-70)	B (60-70)	BB (70-80)	CC (50-60)	B (60-70)	B (60-70)	BB (70-80)	
2	% Rata-rata Capaian Kinerja Program RSUD Labuang Baji	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	% Temuan Material	-	-	2%	1%	1%	0,3%	2%	1%	1%	0,3%	
4	Tingkat pemanfaatan tempat tidur (%BOR)	60 - 85%	-	40%	50%	60%	65%	40%	50%	60%	65%	
5	Rata-rata lamanya pasien di rawat (AvLOS)	6 - 9 Hari	-	8 Hari	7 Hari	7 Hari	6 Hari	8 Hari	7 Hari	7 Hari	6 Hari	
6	Rata-rata waktu penggunaan tempat tidur (TOI)	1 -3 Hari	-	5 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari	5 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari	
7	Frekuensi pemakaian tempat tidur pasien (BTO)	40 - 50 Kali	-	20 Kali	40 Kali	40 Kali	40 Kali	20 Kali	40 Kali	40 Kali	40 Kali	
8	Menurunnya Angka Kematian Kasar (GDR)	<45 ‰	-	50/1000	45/1000	40/1000	35/1000	50/1000	45/1000	40/1000	35/1000	
9	Menurunnya Angka Kematian setelah dirawat (NDR)	<25 ‰	-	35/1000	30/1000	25/1000	20/1000	35/1000	30/1000	25/1000	20/1000	

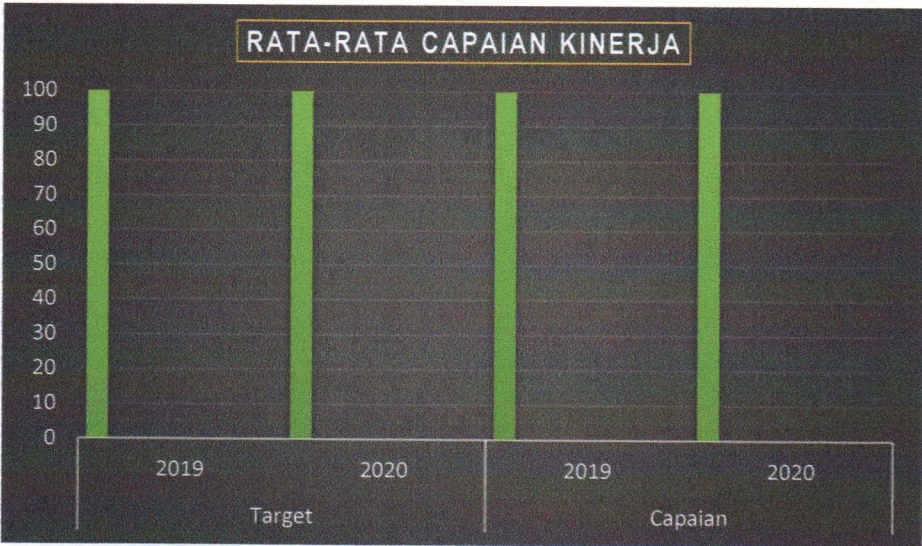
➤ **Nilai SAKIP**

Nilai SAKIP RSUD Labuang Baji menggambarkan Indikator yang dinilai mulai dari Perencanaan Kerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja. Target yang ingin di capai tahun 2019 dengan nilai CC (50-60) dengan realisasi dengan nilai CC (50-60) dapat dilihat pada grafik berikut ini :



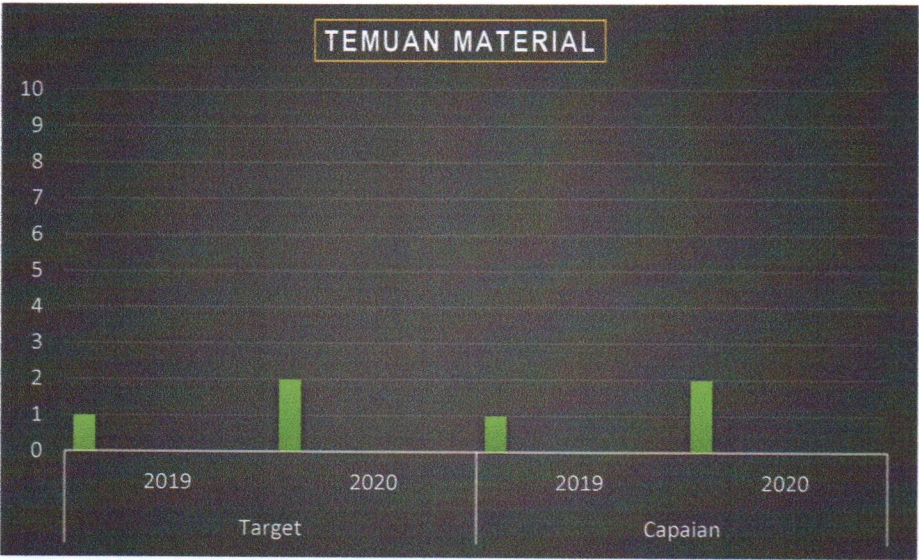
➤ **Rata-rata Capaian Kinerja**

Persentase Capaian Kinerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dihitung berdasarkan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja. Target yang ingin dicapai 100% dengan Realisasi capaian 100% dapat dilihat pada grafik berikut ini :



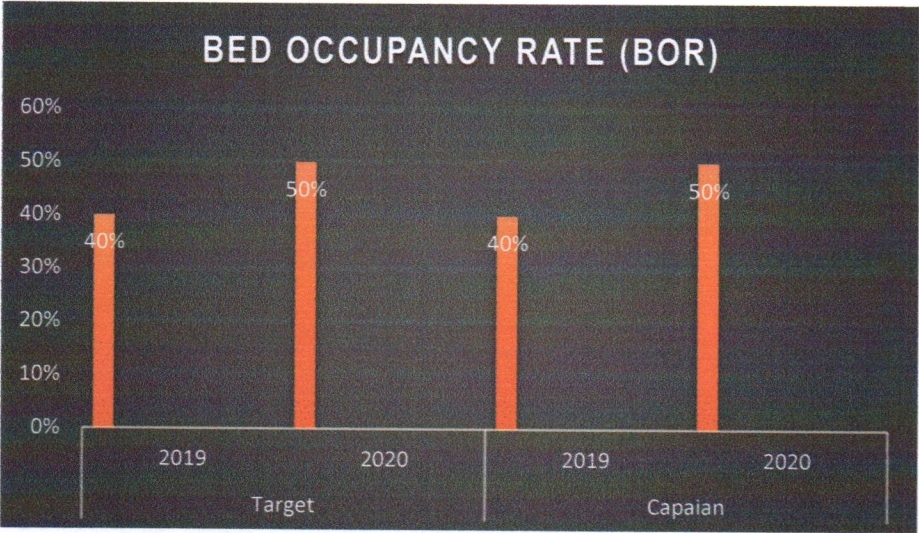
➤ **Temuan Material**

Persentase Temuan Material RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dengan target yang telah ditetapkan tahun 2019 yaitu 2% dengan realisasi masih 2% dapat dilihat pada grafik berikut ini :



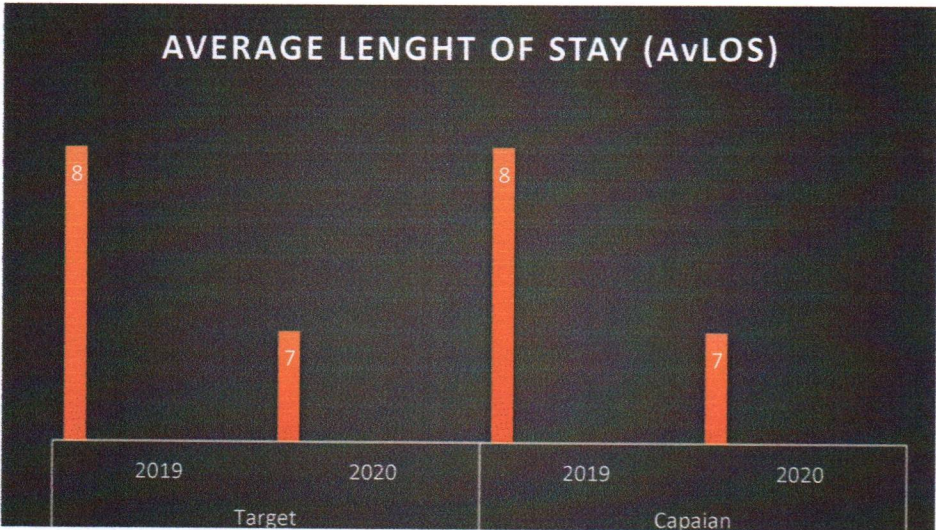
➤ **Bed Occupancy Rate (BOR)**

BOR menggambarkan berapa banyak Tempat Tidur (TT) di rumah sakit yang digunakan dalam suatu masa, dihitung berdasarkan jumlah hari perawatan dalam waktu tertentu dibagi jumlah tempat kali jumlah hari dalam satu satuan waktu kali 100%. Dikatakan ideal jika mencapai 75-85%. Target BOR RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 yakni 40%. Pencapaian BOR pada tahun 2019 yakni hanya 40% dapat dilihat pada grafik berikut ini :



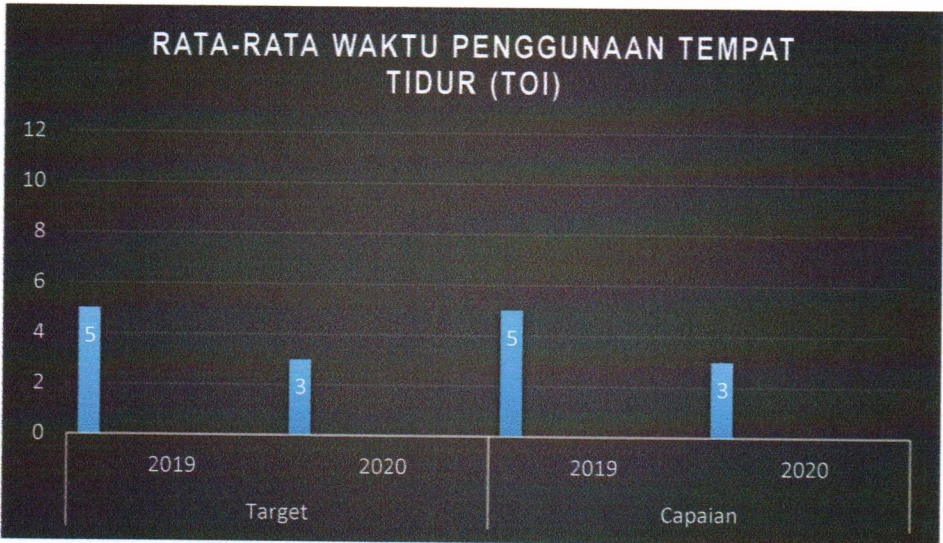
➤ **Average Length of Stay (AvLOS)**

Indikator ini menggambarkan tingkat efisiensi dan mutu pelayanan rumah sakit, yang dihitung berdasarkan jumlah lama dirawat pasien keluar RS dibagi jumlah pasien keluar RS (hidup + mati). Dikatakan efisien jika AvLOS berkisar antara 6-9 hari. Pada Tahun 2020 AvLOS RSUD Labuang Baji ditargetkan selama 8 hari dan realisasi pada tahun 2019 AvLOS mencapai 8 hari dapat dilihat pada grafik berikut ini :



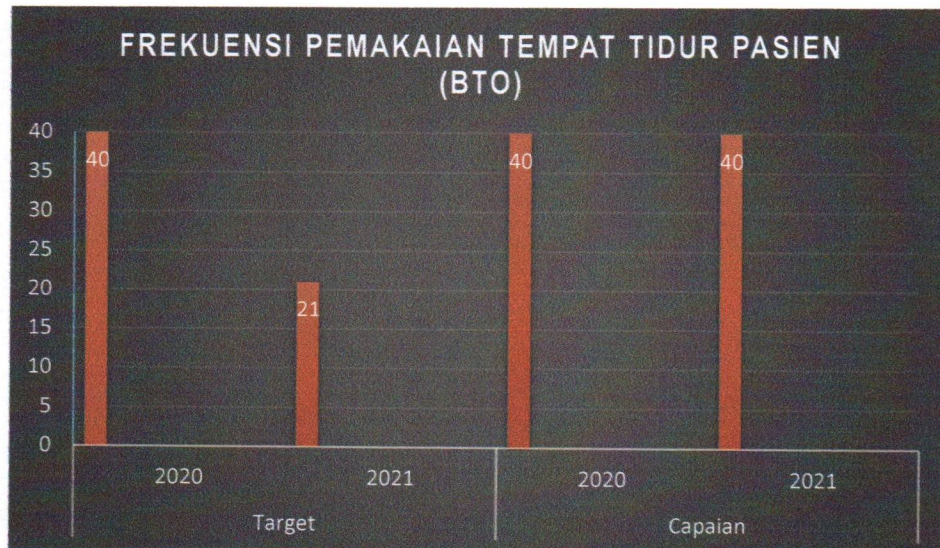
➤ **Turn Over Interval (TOI)**

Indikator ini menggambarkan tingkat efisiensi dan mutu pelayanan rumah sakit, yang dihitung berdasarkan jumlah kapasitas tempat tidur – rata jumlah pasien keluar. Periode/jumlah hari perawatan. Rata-rata jumlah hari sebuah tempat tidur tidak terisi, yaitu waktu antara sebuah tempat tidur ditinggalkan pasien sampai dengan saat ditempati lagi oleh pasien lain berikutnya, TOI ideal 1-3 hari. Pada Tahun 2019 TOI RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan ditargetkan selama 5 hari, dan realisasi pada tahun 2019 AvLOS mencapai 5 hari dapat dilihat pada grafik berikut ini :



➤ **Bed Turn Over (BTO)**

Indikator ini menggambarkan berapa kali satu TT ditempati pasien dalam 1 tahun, yang dihitung berdasarkan jumlah pasien keluar RS (hidup+mati) dalam 1 tahun dibagi jumlah tempat tidur tahun bersangkutan. Dikatakan ideal jika BTO lebih dari 40-50 kali/tahun. Adapun target BTO pada tahun 2019 yakni 20 kali sedangkan pencapaiannya pada tahun 2020 mencapai 20 kali. dapat dilihat pada grafik berikut ini :



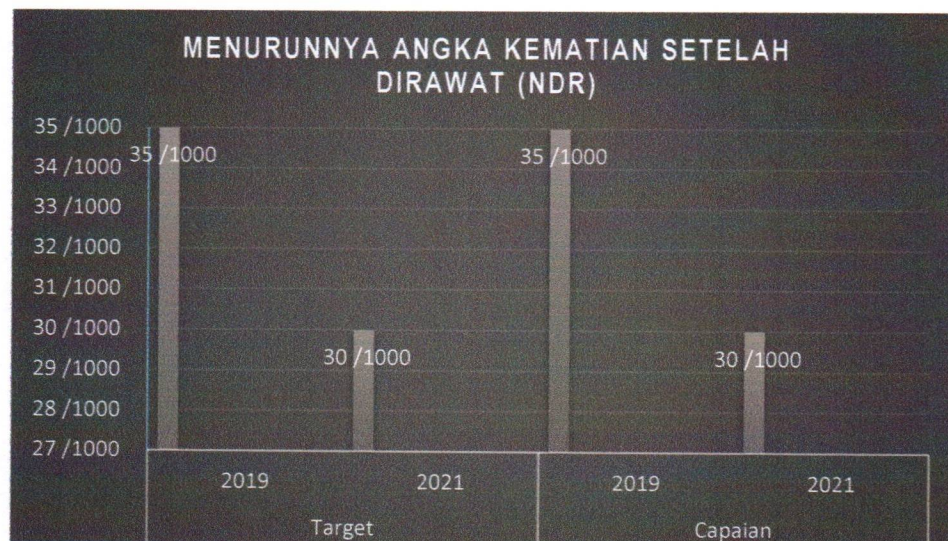
➤ **Menurunnya Angka Kematian Kasar (GDR)**

Indikator ini menggambarkan tingkat kematian yang disebabkan faktor pelayanan di Rumah Sakit, yang dihitung berdasarkan (jumlah pasien mati seluruhnya dibagi jumlah pasien keluar (hidup + mati)) x 1000‰. Semakin rendah GDR berarti mutu pelayanan rumah sakit semakin baik dan angka yang bisa digunakan untuk menilai mutu pelayanan jika angka kematian < 48 jam tinggi. Idealnya GDR adalah < 45‰ target yang ingin dicapai pada tahun 2019 adalah 50/1000 sedangkan capaiannya 50/1000 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



➤ **Menurunnya Angka Kematian Setelah di Rawat (NDR)**

Indikator ini menggambarkan tingkat kematian yang disebabkan faktor pelayanan di Rumah Sakit, yang dihitung berdasarkan jumlah pasien mati > 48 jam dirawat dibagi jumlah pasien keluar (hidup + mati) kali 1000. Idealnya NDR adalah 25%. Target yang ingin dicapai pada tahun 2019 adalah 35/1000 sedangkan capaiannya 35/1000 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Kinerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 secara umum baik dengan memperhatikan indikator pencapaian sasaran kinerja pelayanan, kinerja pelayanan publik dan keuangan sekaligus merupakan indikator keberhasilan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Berikut ini isu-isu penting dan strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya jumlah tenaga dokter subspesialis dan konsultan pada keahlian tertentu sehingga jenis pelayanan kesehatan di rumah sakit tidak maksimal;
2. Kondisi dan ketersediaan bangunan baik dari segi persyaratan teknis, luas dan kenyamanan saat ini belum seluruhnya sesuai dengan standar normatif rumah sakit kelas B, khususnya sarana dan lahan parkir.
3. Ketersediaan peralatan baik segi jumlah, jenis dan kualitas peralatan medis maupun peralatan non medis pada beberapa instalasi/unit masih menjadi permasalahan.
4. Sistem tata kelola rumah sakit masih belum berjalan secara optimal dikarenakan struktur, tupoksi, uraian jabatan dan uraian tugas masih terjadi tumpang tindih.

5. Mengembangkan produk layanan yang lebih bervariasi dikarenakan pergeseran gaya hidup dan semakin meningkatnya umur harapan hidup, angka kejadian penyakit seperti stroke, cancer, serta meningkatnya pasien geriatri menjadi peluang bagi rumah sakit untuk dapat mengembangkan layanan unggulan di bidang tersebut.
6. Perkembangan tingkat sosial ekonomi masyarakat, teknologi dan informasi membuat masyarakat semakin memiliki tuntutan terhadap pelayanan kesehatan dengan kualitas yang lebih baik. Masyarakat semakin mengerti akan hak-haknya sebagai pasien, semakin mandiri dalam menentukan fasilitas pelayanan kesehatan yang akan digunakan.
7. Kehadiran Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan Perguruan Tinggi lainnya yang ada di kota Makassar menjadi peluang bagi rumah sakit dalam pemenuhan kebutuhan SDM ke depan, serta kerjasama dalam mewujudkan rumah sakit pendidikan provinsi.
8. Kemajuan teknologi informasi yang pesat menyebabkan rumah sakit perlu memperhatikan pentingnya **management information system**, agar informasi dan data yang begitu melimpah, dapat digunakan untuk meningkatkan nilai tambah dalam memberikan jasa layanan pasien dan masyarakat secara umum.
9. Semakin banyaknya fasilitas kesehatan baik rumah sakit, klinik dan dokter praktek menyebabkan persaingan dalam industri kesehatan di kota Makassar menjadi semakin kompetitif.

Pemasalahan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya layanan unggulan karena diperlukan dukungan dari unit penunjang untuk memperlancar layanan, hal ini terkait dengan sarana dan prasarana serta peralatan yang dibutuhkan;
2. Belum optimalnya sistem monitoring, evaluasi, dan perbaikan secara berkesinambungan;
3. Belum optimalnya sistem intergrasi layanan kesehatan, kaitannya dengan penelitian dan pengembangan;
4. Belum optimalnya sistem budaya kerja termasuk sistem pemberian reward dan Punishment;
5. Belum optimalnya SIM RS yang terkoneksi ke seluruh bagian/ Instalasi/ Unit yang ada di rumah sakit;
6. Pembayaran klaim dari pihak BPJS Kesehatan yang tidak lancar dan dibayar tidak sesuai dengan tagihan, hal ini mempengaruhi kondisi rumah sakit terutama perihal

pembayaran dengan pihak distributor obat maupun pembayaran jasa pelayanan untuk tenaga di RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan;

7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan baik oleh Rumah Sakit maupun pihak independen sudah mendapat nilai dalam kategori baik. Menurut hasil analisa survey, beberapa hal yang perlu diperbaiki antara lain kecepatan pelayanan, lama waktu tunggu pasien, alur pelayanan, dan beberapa hal terkait sarana penunjang dan kebersihan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi RSUD Labuang Baji. Di samping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2021, dapat dilihat pada tabel T-C.31

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Perangkat Daerah : Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji

Lembar dari

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				76.875.579.760,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				76.875.579.760,00	
01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		% Keterpenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu		100.000.000,00	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.000.000,00	
01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ketertarikan dan keberlibatan umum yang tersusun	0 Dokumen		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ketertarikan dan keberlibatan umum yang tersusun	0 Dokumen		
			Jumlah Dokumen Renja yang tersusun	1 Dokumen	10.000.000,00			Jumlah Dokumen Renja yang tersusun	1 Dokumen	10.000.000,00	
02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	1 Dokumen	20.000.000,00	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK	1 Usulan Kegiatan	50.000.000,00			Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK	1 Usulan Kegiatan	50.000.000,00	
03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun	1 Dokumen	10.000.000,00	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun	1 Dokumen	10.000.000,00	
04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Koordinasi yang terlaksana	10 Kali	10.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Koordinasi yang terlaksana	10 Kali	10.000.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Analisis
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
02	Administrasi Keuangan		% Pemenuhan administrasi Keuangan		74.944.379.760,00	Administrasi Keuangan		% Pemenuhan administrasi Keuangan		74.944.379.760,00	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	74.844.379.760,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	74.844.379.760,00	
02	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kota Makassar	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	1 Laporan	50.000.000,00	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kota Makassar	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	1 Laporan	50.000.000,00	
03	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Kota Makassar	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	50.000.000,00	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Kota Makassar	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	50.000.000,00	
03	Administrasi Umum		% Pemenuhan administrasi Umum		1.635.900.000,00	Administrasi Umum		% Pemenuhan administrasi Umum		1.635.900.000,00	
01	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang tersedia	1 RS	700.000.000,00	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang tersedia	1 RS	700.000.000,00	
02	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Makassar	Jumlah ATK yang tersedia	2 Jenis ATK	55.000.000,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Makassar	Jumlah ATK yang tersedia	2 Jenis ATK	55.000.000,00	
03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	1 Unit	330.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	1 Unit	330.000.000,00	
04	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Makassar	Jumlah perjalanan dinas	25 Kali	369.400.000,00	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Makassar	Jumlah perjalanan dinas	25 Kali	369.400.000,00	
05	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Makassar	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	90 Unit	181.500.000,00	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Makassar	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	90 Unit	181.500.000,00	
06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Makassar	Jumlah Gedung Kantor/arsama yang dipelihara	0 Unit	-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Makassar	Jumlah Gedung Kantor/arsama yang dipelihara	0 Unit	-	
04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		% ASN berkinerja sangat baik		195.300.000,00	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		% ASN berkinerja sangat baik		195.300.000,00	
01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kota Makassar	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang tersedia	0 Pasang	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kota Makassar	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang tersedia	0 Pasang	-	
02	Pengadaan Pakaian Korpri	Kota Makassar	Jumlah Pakaian Korpri yang tersedia	563 Pasang	195.300.000,00	Pengadaan Pakaian Korpri	Kota Makassar	Jumlah Pakaian Korpri yang tersedia	563 Pasang	195.300.000,00	
03	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kota Makassar	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	0 Pasang	-	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Kota Makassar	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	0 Pasang	-	
04	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Makassar	Jumlah aparatur PD yang mengikuti sosialisasi	0 Orang	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Makassar	Jumlah aparatur PD yang mengikuti sosialisasi	0 Orang	-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN		Persentase Pasien yang Mendapatkan Perawatan sesuai standar Pelayanan Minimal		98.485.795.840,30	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN		Persentase Pasien yang Mendapatkan Perawatan sesuai standar Pelayanan Minimal		98.485.795.840,30	
01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Di RSUD Labuang Baji		91.583.795.840,30	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Di RSUD Labuang Baji		91.583.795.840,30	
01	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang tersedia	1 Unit	500.000.000,00	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang tersedia	1 Unit	500.000.000,00	
02	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang tersedia	3 Paket	18.258.211.360,30	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang tersedia	3 Paket	18.258.211.360,30	
02	Pengadaan Alat Kesehatan Alat Perunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Peralatan Medis yang tersedia	12 Bulan	68.775.584.480,00	Pengadaan Alat Kesehatan Alat Perunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Peralatan Medis yang tersedia	12 Bulan	68.775.584.480,00	
03	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Kota Makassar	Jumlah Alat Kesehatan yang terkalibrasi	1 Paket	100.000.000,00	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Kota Makassar	Jumlah Alat kesehatan yang terkalibrasi	1 Paket	100.000.000,00	
04	Pengadaan Bahan Habis Pakal Lainnya Sprei Handuk dan Habis Pakal Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Bahan Habis Pakal yang tersedia	12 Bulan	1.200.000.000,00	Pengadaan Bahan Habis Pakal Lainnya Sprei Handuk dan Habis Pakal Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Bahan Habis Pakal yang tersedia	12 Bulan	1.200.000.000,00	
05	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Kota Makassar	Jumlah Pengadaan Peralatan Laundry yang tersedia	1 Paket	500.000.000,00	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Kota Makassar	Jumlah Pengadaan Peralatan Laundry yang tersedia	1 Paket	500.000.000,00	
06	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang dilakukan	1 Paket	250.000.000,00	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang dilakukan	1 Paket	250.000.000,00	
07	Distribusi Alat Kesehatan, Obat Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah obat vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya	12 Bulan	2.000.000.000,00	Distribusi Alat Kesehatan, Obat Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah obat vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya	12 Bulan	2.000.000.000,00	
02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Cakupan Promosi Pelayanan Kesehatan di RS		50.000.000,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Cakupan Promosi Pelayanan Kesehatan di RS		50.000.000,00	
01	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Paket	50.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Paket	50.000.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Cakupan ketersediaan Sistem Informasi RS yg Terintegrasi		100.000.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Cakupan ketersediaan Sistem Informasi RS yg Terintegrasi		100.000.000,00	
01	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang dikelola	1 Sistem Informasi/Aplikasi	100.000.000,00	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang dikelola	1 Sistem Informasi/Aplikasi	100.000.000,00	
04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Cakupan peningkatan standar pelayanan kesehatan		6.752.000.000,00	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Cakupan peningkatan standar pelayanan kesehatan		6.752.000.000,00	
01	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Akreditasi Rumah Sakit yang tersedia	1 Dokumen	200.000.000,00	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Akreditasi Rumah Sakit yang tersedia	1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kesehatan yang terbayarkan	190 Orang	6.552.000.000,00			Jumlah Tenaga Kesehatan yang terbayarkan	190 Orang	6.552.000.000,00	
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		580.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		580.000.000,00	
01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah pegawai RS yang mengikuti pengembangan kompetensi		580.000.000,00	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah pegawai RS yang mengikuti pengembangan kompetensi		580.000.000,00	
01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Pegawai RS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	190 Orang	580.000.000,00	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Pegawai RS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	190 Orang	580.000.000,00	
JUMLAH					175.941.375.600,30					175.941.375.600,30	

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk lima tahun ke depan. Adapun rencana program dimaksud yang sesuai dalam RPJMD Pemerintah Sulawesi Selatan 2018-2023 yaitu Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan. Namun dalam pelaksanaannya didukung pula dengan beberapa program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, diantaranya :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Rencana kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan merupakan hasil dari usulan dan diskusi melalui pembahasan internal rumah sakit. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C.32 berikut :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rumah Sakit oleh WHO (1957) diberikan batasan yaitu suatu bahagian menyeluruh, (Integrasi) dari organisasi dan medis, berfungsi memberikan pelayanan kesehatan lengkap kepada masyarakat baik kuratif maupun rehabilitatif, dimana output layanannya menjangkau pelayanan keluarga dan lingkungan, rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan tenaga kesehatan serta untuk penelitian biososial.

Fungsi Rumah sakit selain yang di atas juga merupakan pusat pelayanan rujukan medik spesialistik dan sub spesialistik dengan fungsi utama menyediakan dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan (kuratif) dan Pemulihan (rehabilitasi pasien) (Depkes R.I. 1989) Maka sesuai dengan fungsi utamanya tersebut perlu pengaturan sedemikian rupa sehingga rumah sakit mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan berdaya guna dan berhasil guna.

Menurut surat keputusan Menteri Kesehatan RI No. 983/ Menkes/17/1992 tentang pedoman organisasi rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat dasar, spesialistik, dan sub spesialistik, sedangkan klasifikasi didasarkan pada perbedaan tingkat menurut kemampuan pelayanan kesehatan yang dapat disediakan yaitu rumah sakit kelas A, Kelas B, (Pendidikan dan Non Pendidikan) kelas C dan Kelas D.

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang parmanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

Adanya kemajuan teknologi disertai dengan penggunaan cara-cara baru dibidang diagnostik dan terapeutik mengharuskan rumah sakit mempekerjakan berbagai profesi kedokteran dan profesi lain sehingga rumah sakit menjadi organisasi padat karya spesialis dan merupakan tempat dimana terjadi proses pengubahan dari masukan menjadi luaran.

- a. Masukan utama adalah dokter, perawat personil lainnya, prasarana, sarana peralatan dan sebagainya.
- b. Sedangkan untuk menilai pemanfaatan tenaga dipergunakan digunakan indikator :
 - Rasio kunjungan dengan jumlah tenaga perawat jalan.
 - Rasio jumlah hari perawatan dengan jumlah tenaga perawat inap.
 - Rasio jumlah pasien intensif dengan jumlah tenaga perawat yang melayani.

- Rasio persalinan dengan tenaga bidan yang melayani.

Demikian juga Indikator untuk penilaian cakupan pelayanan adalah :

- Rata-rata kunjungan per hari;
- Rata-rata kunjungan baru per hari;
- Rasio kunjungan baru dengan total kunjungan;
- Jumlah rata-rata pasien IRD per hari;
- Rata-rata pasien intensif per hari;
- Rata-rata pemeriksaan radiologi per hari;
- Prosentase r/ yang dilayani terhadap r/ rumah sakit;
- Prosentase item obat dalam formularium;
- Jumlah pelayanan ambulans;
- Rasio banyaknya cucian dengan pasien rawat inap;
- Prosentase penyediaan makanan khusus;
- Rasio pasien rawat jalan terhadap jumlah penduduk dalam, *catchment area*;
- Admission use rate;
- Hospitalization rate.

Arah kebijakan bidang kesehatan tahun 2020 – 2024 adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Kementerian Kesehatan RI memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/ kabupaten/ kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kesehatan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan yaitu :

1. Penyediaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan di rumah sakit sesuai dengan SPM sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyat dan diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang;
2. Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM yang telah ditetapkan;
3. Penyediaan pelayanan jaminan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan mudah diakses.

Prioritas pembangunan nasional meliputi 11 yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi dan 3 prioritas lainnya. Prioritas tersebut dijabarkan ke dalam berbagai sasaran dan kebijakan.

Untuk mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yaitu **“Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter”** dan visi RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, yaitu : **“Menjadi Rumah Sakit Unggulan Provinsi yang Inovatif dan Kompetitif Tahun 2023”** yang diharapkan bersinergi dan mendukung pencapaian target serta tujuan pembangunan, khususnya pembangunan sektor kesehatan di Sulawesi Selatan.

Adapun keterkaitan antara misi kebijakan daerah dengan kebijakan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

- Misi : 1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi, Melayani dan Inovatif;
4. Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Kompetitif dan Inklusif;

Dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur Sulawesi Selatan Periode Tahun 2018-2023 yang menjadi program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi rujukan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2018-2023 yaitu Program Baruga Pelayanan Masyarakat

RSUD Labuang Baji dalam melaksanakan program dan kegiatannya harus berpedoman dan bersinergi dengan Visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Selatan sebagai bentuk implementasi dan kolaborasi yang baik. Seperti yang telah digambarkan sebelumnya terkait Visi, maka Misi RSUD Labuang Baji dapat disebutkan, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pelayanan Prima yang Inovatif;
2. Mewujudkan Profesionalisme SDM yang Kompetitif;
3. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas; dan
4. Mewujudkan Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Rumah Sakit.

Sebagai wujud pelaksanaan Visi dan Misi tersebut, RSUD Labuang Baji mempunyai 4 (empat) Program Unggulan yang nantinya menjadi landasan dalam berkinerja, yaitu :

1. Pengembangan Kapasitas RS Pendidikan Provinsi;
2. Rumah Sakit Rujukan Layanan Brain and Vascular;
3. Rumah Sakit Rujukan Layanan TB-MDR; dan
4. Rumah Sakit Rujukan Layanan Kesehatan Ibu dan Anak.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan yang ingin dicapai dalam rencana kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Renstra RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Pasien.

Dalam rangka mencapai hasil yang akan dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan dimaksud, maka sasaran yang akan dicapai dalam rentang waktu lima tahun ke depan yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan indikator sasaran adalah :
 - a. Nilai SAKIP RSUD Labuang Baji;
 - b. Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Program RSUD Labuang Baji;
 - c. Persentase Temuan Material.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit, dengan indikator sasaran adalah:
 - a. Tingkat pemanfaatan tempat tidur (%BOR);
 - b. Rata-rata lamanya pasien di rawat (AvLOS);
 - c. Rata-rata waktu penggunaan tempat tidur (TOI);
 - d. Frekuensi pemakaian tempat tidur pasien (BTO);
 - e. Angka kematian kasar (GDR);
 - f. Angka kematian setelah dirawat (NDR).

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Pelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas;
2. Pencapaian jenis layanan RS yang sesuai kelas RS;
3. Pembuatan sistem indikator kinerja utama RS, pembuatan dan pengukuran kepatuhan terhadap clinical pathway serta pengukuran tingkat kepuasan pelanggan
4. Menjamin ketersediaan struktur organisasi pada seluruh unit yang ada di RS secara efektif, lengkap dengan uraian tugas dan tanggung jawab dan indikator penilaian kinerja seluruh staf RS serta mendorong pencapaian SPM unit-unit di RS;
5. Peningkatan kapasitas kinerja petugas dengan kinerja ekselen;
6. Rumah Sakit dapat terakreditasi berdasarkan standar kelas.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2021 mempunyai beberapa program diantaranya :

1. Peningkatan Kinerja Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Pemerintah

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi RSUD RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan, maka dilaksanakan program peningkatan kinerja dalam rangka penguatan kelembagaan yang diselenggarakan melalui 1 Program sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, terdiri dari 4 kegiatan dan 17 sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ✚ Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
 - ✚ Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan;
 - ✚ Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah;
 - ✚ Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah.
 - 2) Administrasi Keuangan
 - ✚ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - ✚ Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - ✚ Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran.
 - 3) Administrasi Umum
 - ✚ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - ✚ Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - ✚ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 - ✚ Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
 - ✚ Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - ✚ Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
 - 4) Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - ✚ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - ✚ Pengadaan Pakaian Korpri;
 - ✚ Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

🚧 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan, maka dilaksanakan program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan melalui 2 Program sebagai berikut :

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, terdiri dari 4 kegiatan dan 11 sub kegiatan, yakni :

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

- 🚧 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
- 🚧 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
- 🚧 Pengadaan Alat Kesehatan Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan;
- 🚧 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi;
- 🚧 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya Sprei Handuk dan Habis Pakai Lainnya;
- 🚧 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit;
- 🚧 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan;
- 🚧 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya.

2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

- 🚧 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan.

3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

- 🚧 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan.

4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

- 🚧 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yakni :

1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

- 🚧 Peningkatan kompetensi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Rumusan Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel T-C.33.

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Perangkat Daerah : Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji				lembar dari								
Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
0	00	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				76.875.579.760,00				79.517.006.067,91
0	00	01	1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Keterpenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi Kinerja tepat waktu			100.000.000,00				100.000.000,00
0	00	01	1.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ketertaman dan ketertiban umum yang tersusun	Kota Makassar	0 Dokumen	-	APBD		0 Dokumen	-
					Jumlah Dokumen Renja yang tersusun			1 Dokumen	10.000.000,00	APBD		1 Dokumen
0	00	01	1.01	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	Kota Makassar	1 Dokumen	20.000.000,00	APBD		1 Dokumen	20.000.000,00
					Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK			1 Usulan Kegiatan	50.000.000,00	APBD		1 Usulan Kegiatan
0	00	01	1.01	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun	Kota Makassar	1 Dokumen	10.000.000,00	APBD		1 Dokumen	10.000.000,00
0	00	01	1.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Koordinasi yang terlaksana	Kota Makassar	10 Kali	10.000.000,00	APBD		10 Kali	10.000.000,00
0	00	01	1.02	Administrasi Keuangan	% Pemenuhan administrasi Keuangan			74.944.379.760,00				77.466.916.067,91
0	00	01	1.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	1 Tahun	74.844.379.760,00	APBD		1 Tahun	77.366.916.067,91

Kode				Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
0	00	01	1.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Kota Makassar	1 Laporan	50.000.000,00	APBD	1 Laporan	50.000.000,00
0	00	01	1.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	Kota Makassar	1 Laporan	50.000.000,00	APBD	1 Laporan	50.000.000,00
0	00	01	1.03		Administrasi Umum	% Pemenuhan administrasi Umum			1.635.900.000,00			1.559.490.000,00
0	00	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang tersedia	Kota Makassar	1 RS	700.000.000,00	APBD	1 RS	750.000.000,00
0	00	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Kota Makassar	2 Jenis ATK	55.000.000,00	APBD	2 Jenis ATK	60.500.000,00
0	00	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kota Makassar	1 Unit	330.000.000,00	APBD	1 Unit	363.000.000,00
0	00	01	1.03	18	Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Kota Makassar	25 Kali	369.400.000,00	APBD	25 Kali	186.340.000,00
0	00	01	1.03	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	Kota Makassar	90 Unit	181.500.000,00	APBD	90 Unit	199.660.000,00
0	00	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor/asrama yang dipelihara	Kota Makassar	0 Unit	-	APBD	0 Unit	-
0	00	01	1.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% ASN berkinerja sangat baik			195.300.000,00			390.600.000,00
0	00	01	1.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang tersedia	Kota Makassar	0 Pasang	-	APBD	0 Pasang	-
0	00	01	1.04	03	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah Pakaian Korpri yang tersedia	Kota Makassar	563 Pasang	195.300.000,00	APBD	0 Pasang	-
0	00	01	1.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	Kota Makassar	0 Pasang	-	APBD	563 Pasang	195.300.000,00
0	00	01	1.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur PD yang mengikuti sosialisasi	Kota Makassar	0 Orang	-	APBD	557 Orang	195.300.000,00

Kode				Usuran/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pasien yang Mendapatkan Perawatan sesuai standar Pelayanan Minimal			98.485.795.840,30				98.533.153.524,14
1	02	02	1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Di RSUD Labuang Baji			91.583.795.840,30				92.631.153.524,14
1	02	02	1.01	02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang tersedia	Kota Makassar	1 Unit	500.000.000,00	APBD	1 Unit	500.000.000,00
1	02	02	1.01	04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang tersedia	Kota Makassar	3 Paket	18.258.211.360,30	APBD	3 Paket	16.747.840.596,14
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Peralatan Medis yang tersedia	Kota Makassar	12 Bulan	68.775.584.480,00	APBD	12 Bulan	71.333.312.928,00
1	02	02	1.01	13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat kesehatan yang terkalibrasi	Kota Makassar	1 Paket	100.000.000,00	APBD	1 Paket	100.000.000,00
1	02	02	1.01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya Sprei Handuk dan Habis Pakai Lainnya	Jumlah Bahan Habis Pakai yang tersedia	Kota Makassar	12 Bulan	1.200.000.000,00	APBD	12 Bulan	1.200.000.000,00
1	02	02	1.01	16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Pengadaan Peralatan Laundry yang tersedia	Kota Makassar	1 Paket	500.000.000,00	APBD	1 Paket	500.000.000,00
1	02	02	1.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang diadakan	Kota Makassar	1 Paket	250.000.000,00	APBD	1 Paket	250.000.000,00
1	02	02	1.01	19	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya	Kota Makassar	12 Bulan	2.000.000.000,00	APBD	12 Bulan	2.000.000.000,00
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Promosi Pelayanan Kesehatan di RS			50.000.000,00	APBD		50.000.000,00
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Makassar	1 Paket	50.000.000,00	APBD	1 Paket	50.000.000,00
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Cakupan ketersediaan Sistem Informasi RS yg Terintegrasi			100.000.000,00	APBD		100.000.000,00
1	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang dikelola	Kota Makassar	1 Sistem Informasi/Aplikasi	100.000.000,00	APBD	1 Sistem Informasi/Aplikasi	100.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan peningkatan standar pelayanan kesehatan			6.752.000.000,00	APBD			6.752.000.000,00
1	02	1.04	02	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Dokumen Akreditasi Rumah Sakit yang tersedia	Kota Makassar	1 Dokumen	200.000.000,00	APBD		1 Dokumen	200.000.000,00
					Jumlah Tenaga Kesehatan yang terbayakan		190 Orang	6.552.000.000,00	APBD		190 Orang	6.552.000.000,00
1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			580.000.000,00	APBD			730.000.000,00
1	02	1.02	03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pegawai RS yang mengikuti pengembangan kompetensi			580.000.000,00	APBD			730.000.000,00
1	02	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pegawai RS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kota Makassar	190 Orang	580.000.000,00	APBD		220 Orang	730.000.000,00
Jumlah								175.941.375.600,30				179.780.159.592,05

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Dengan adanya tuntutan dari BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan yang mengharuskan semua Rumah sakit harus terakreditasi demi menjaga kualitas pelayanan yang sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga rumah sakit harus menjaga kualitas pelayanan dengan meningkatkan sumberdaya yang dimiliki dan selalu berupaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan guna memenuhi tuntutan masyarakat seiring dengan tata kelola baru di bidang kesehatan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun keempat dari Renstra Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Kaidah Pelaksanaan Renja sebagai berikut :

- 1) Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan yang disertai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2021;
- 2) Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 digunakan juga sebagai pertimbangan untuk penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit tahun anggaran 2021.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

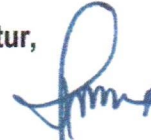
- 1) Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 sebagaimana tujuannya, diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran tahun 2021 yang dapat dimanfaatkan oleh jajaran rumah sakit sendiri maupun stakeholder yang berkepentingan.
- 2) Semoga Rencana Kerja SKPD ini dapat dipedomani sebagai alat kendali mulai perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan sampai dengan evaluasi RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.

Dokumen Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 disusun dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2021. serta seluruh aparatnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait terutama untuk memudahkan akses masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan guna terselenggaranya upaya kesehatan secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan,

terjangkau dan bermutu kepada masyarakat sebagaimana tujuan pembangunan di bidang kesehatan yakni tercapainya hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum.

Makassar, April 2020

Direktur,



dr.H. ANDI MAPPATOBA, MBA, DTAS

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP. 19670128.199803.1.004